



Samsuri Nugroho (kiri) saat peluncuran tiga bukunya.

KR - Warisman

SAMSURI EKS KEPALA SMKN 3 KASIHAN Pensiun dari Guru Luncurkan Tiga Buku

BANTUL (KR) - Menandai memasuki masa pensiun sebagai guru di SMKN 3 Kasihan Bantul (SMSR) per 1 April mendatang, Drs Samsuri Nugroho (60) meluncurkan tiga buku tentang wayang di Galeri SMSR, Rabu (24/3). Tiga buku tersebut berjudul 'Meniti Jalan Tegal Kurusetra', 'Kumpulan Cerita Tabiyatul Wayang Milenial' dan 'Alengka Negeri Berselimut Trgedi'.

Samsuri pada tahun 2009 mendapat Penghargaan peduli Budaya dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Sebelumnya, pernah meraih Penghargaan Karya Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI, penghargaan dari Kyoto Prefectural Board Education Mr Hiroaki Tahara Japan dan penghargaan Insan Pendidikan Berprestasi dari Gubernur DIY pada tahun 2017. "Acara ini sebagai pamitan dan reuni dengan teman-teman," kata Samsuri.

Pada kesempatan itu hadir sejumlah teman lamanya, seperti Kepala SMKN 1 Kasihan Drs Ardani MPd, Kepala SMKN 2 Kasihan Agus Suranto SPd MSn, Kepala SMKN 3 Kasihan Sihono SPd, guru dan karyawan dari tiga sekolah yang berada dalam satu kompleks itu dan beberapa seniman. Acara juga dimeriahkan

ansamble string dari guru dan siswa SMKN 2 Kasihan serta pameran lukisan. Menurut Samsuri, selain penghargaan, dirinya juga pernah mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, China, Jepang, Turki, Inggris, New Zealand, Vietnam dan Kanada. Pernah menjadi juara nasional lomba menulis Best Practices Kepala SMK tahun 2017 dan menulis cerpen tingkat nasional tahun 2019.

Pengawas SMK DIY dan penulis buku-buku SMK Drs Rustamaji MPd menyebutkan, buku karya Samsuri idenya sederhana, namun dibingkai dengan kelincihan gaya dan pilihan kata yang *mentes* dan bernas. Ibarat penari, ia dapat menarik gagasan dengan kelentikan gaya tutur, kejituan arah dan kedalaman rasa. Tulisan Samsuri *rumesep* dan terasa nikmatnya. Sedangkan kolumnis dan pendidik Arifah Suryaningsih mengomentari, Sasmuri pencerita yang luar biasa. Tulisan Samsuri *renyah* dan tidak bersifat menggurui. Dunia wayang yang sejatinya merupakan cerminan manusia banyak diangkat dalam penceritaannya. **(War)-f**

DIHITUNG BERDASARKAN KEMAHALAN DAERAH

Skema Dana BOS Untungkan Sekolah di 3T

JAKARTA (KR) - Skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing berbeda, dihitung dan dipengaruhi tingkat indikator kemahalan konstruksi daerah untuk kemudian dikalikan dengan jumlah siswa. Skema perubahan hitung ini akan menguntungkan sekolah di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Demikian disampaikan Sekretaris Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, dalam se-

buah YouTube, Jumat (26/3). "Hal itu disebabkan pemberian dana BOS dipengaruhi tingkat indikator kemahalan konstruksi daerah dan kemudian dikalikan dengan jumlah

siswa," jelasnya.

Ia membenarkan, skema perubahan hitung itu menguntungkan daerah 3T. Sebab, yang digunakan adalah indikator kemahalan kontruksi sebagai pengali dari jumlah siswa dan unit cost berdasarkan indeks kemahalan konstruksi.

Sutanto kemudian memberikan gambaran, misalnya BOS di Kabupaten Salatiga Jateng akan berbeda dengan BOS di pegunungan Bintang Papua. Di Papua, katanya,

bisa dua kali lipat unit cost di Salatiga. "Jadi yang dulu anggarannya sama sekarang majemuk variatif disesuaikan tingkat kemahalan kabupaten kota masing-masing," terangnya.

Meski begitu, Sutanto memastikan tak ada penurunan anggaran transfer dana BOS pada tahun 2021. Di tahun 2020, perhitungan minimal untuk satu SD, per anak dalam satu tahun sebesar Rp 900 ribu. "Tidak ada yang lebih rendah dari tahun lalu," tambahnya. **(Ati)-f**

Kemendikbud-BNSP Teken 149 Skema Sertifikasi

JAKARTA (KR) - Kemendikbud dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani 149 skema sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa vokasi. Penyusunan skema sertifikasi nasional ini difasilitasi melalui Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang diluncurkan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) pada tahun 2020 lalu.

Penyusunan skema sertifikasi nasional difokuskan pada lima sektor prioritas, meliputi permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality dan care service pada level 5 dan 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau setara dengan jenjang D3 dan D4. Skema ini menjadi instrumen dalam proses sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan secara nasional di seluruh LSP P1 Perguruan Tinggi Vokasi (PTV).

Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menyebutkan, sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan DUDI merupakan salah satu poin paket *link and match* keterlibatan DUDI di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. Paket ini terdiri minimal 8+i poin yang bertujuan menguatkan kemitraan serta penyelarasan dengan industri, di antaranya kurikulum yang disusun bersama industri, pembelajaran berbasis project riil dari industri, dosen tamu/expert dari industri, magang dan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi inilah yang kemudian menjadi upaya sekaligus jaminan penyiapan SDM unggul vokasi bagi industri di masa depan. **(Ati)-f**

RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA Sekolah Inginkan Ada Ketegasan Pemerintah

YOGYA (KR) - Sosialisasi rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Yogyakarta sebenarnya sudah dilakukan sejak Januari lalu. Sebab, semula sempat ada wacana PTM dilaksanakan bulan Pebruari. Secara prinsip persiapan pembelajaran tatap muka sudah tidak ada masalah.

"Namun, sekolah berharap ada ketegasan pemerintah terkait dengan rencana PTM. Karena hal itu berkaitan dengan kesiapan penjadwalan, SDM guru serta fasilitas pendukung prokes," kata Kepala SMP Gotong Royong Yogyakarta, Amelita BR Tarigan, Jumat (26/3).

Menurut Amelita, Dinas Pendidikan meminta sekolah untuk mengintensifkan persiapan dengan membentuk Satgas Covid-19 dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) secara detail. Selain secara administrasi, juga menyediakan sarana prokes membuat jalur keluar masuk dan memasang aturan 5M. Tidak hanya itu, sekolah juga mengencarkan sosialisasi dan edukasi kepada siswa tentang kesiapan PTM.

"Terus terang terkadang siswa masih perlu diingatkan soal penegakkan prokes. Hal itu, karena pemahaman anak masih kurang. Adapun untuk vaksinasi guru, kami sudah mengikuti vaksinasi tahap pertama," terangnya.

Kepala SMAN 9 Yogyakarta, Drs Jumadi MSI menyatakan, sekolah yang dipimpinnya kebetulan menjadi salah satu dari 10 sekolah di DIY yang akan digunakan untuk percontohan PTM. Meski untuk kesiapan yang berkaitan dengan fasilitas dan sarana prasarana untuk penegakkan prokes sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pihak Sekolah berharap sebelum pelaksanaan semua guru sudah divaksin. **(Ria)-f**

EKONOMI

Grab Dukung Vaksinasi di Pemkot Surakarta



KR-Istimewa

Gibran Rakabuming bersama mitra Grab.

SURAKARTA (KR) - Pemkot Surakarta melaksanakan vaksinasi tahap 2 untuk ASN dan pekerja publik sektor transportasi. Termasuk mitra pengemudi dan pengantaran Grab di Balaikota Surakarta, Sabtu-Senin (20-22/3). Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meninjau jalannya pemberian vaksin.

Director of Government Affairs & Strategic Collaborations, Grab Indonesia Uun Ainurrofiq mengaku sangat senang dapat turut berkontribusi dalam mendukung proses vaksinasi bagi ASN dan pekerja publik sektor transportasi di Surakarta. "Kami juga sangat berterima kasih di mana melalui program ini, mitra pengemudi dan pengantaran Grab dapat menerima vaksin, terkait dengan peranan penting mereka dalam melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat selama masa pandemi," ujarnya. **(Sal)-f**

Ekspor RI Mulai Menggeliat

JAKARTA (KR) - Deputi Bank Indonesia (BI) Sugeng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan lebih tinggi lagi, terutama di Amerika Serikat (AS). Sehingga kondisi itu menjadi peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. "Perbaikan ekonomi di dunia terutama di AS pascavaksinasi Covid-19 memberikan peluang bagi kita untuk memacu pertumbuhan ekspor lebih tinggi lagi yang saat ini ekspor sudah mulai menggeliat," kata Sugeng dalam video conference, Kamis (25/3).

Untuk menangkap peluang perbaikan ekonomi tersebut, BI bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pengusaha dan pelaku industri perbankan, akan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas peningkatan kredit dan pembiayaan untuk aktivitas usaha di sektor prioritas. "Dengan langkah sinergi yang terus dilakukan, BI meyakini perekonomian Indonesia pada 2021 akan semakin membaik dan diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 4,3 hingga 5,3 persen," jelas Sugeng.

Menurutnya, perekonomian global pada tahun ini akan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, terutama dukungan stimulus yang signifikan di AS. Perkiraan ini sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga internasional yang telah merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global. **(Lmg)-f**

PERMINTAAN KREDIT MASIH RENDAH

BI DIY Menilai Masyarakat Masih *Wait and See*

YOGYA (KR) - Bank Indonesia (BI) DIY tetap berupaya mendorong perbankan di DIY untuk meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaannya saat ini. Minimnya penyaluran kredit tersebut dipicu masih rendahnya permintaan masyarakat yang masih dalam kondisi *wait and see* serta memikirkan faktor risiko di tengah pandemi Covid-19.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Miyono mengatakan, BI telah mengakomodir cukup baik kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan sampai dengan 3,5 persen. Penurunan suku bunga acuan ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi perbankan untuk bisa mendorong penyaluran kredit.

"Dari sisi likuiditas perbankan itu ada, bahkan sangat mencu-

kupi untuk penyaluran pembiayaan. Justru yang menjadi permasalahannya adalah permintaan kreditnya masih rendah di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19," katanya di Yogyakarta, Jumat (26/3).

Miyono mengakui, masyarakat cenderung masih menunggu alias *wait and see* untuk mengajukan permohonan kredit sejak pandemi. Selain adanya relaksasi kebi-

jakan moneter, pemerintah pun telah mengeluarkan stimulus kebijakan lainnya seperti perpajakan dan sebagainya. Dengan berbagai kebijakan stimulus dan insentif tersebut, perbankan bisa lebih meningkatkan kreditnya baik modal kerja, konsumsi, kredit investasi dan sebagainya.

"Ada stimulus perpajakan, suku bunga acuan sudah kita turunkan dan juga ada likuiditas yang cukup di perbankan serta pandangan perbankan terutama terkait risiko. Mudah-mudahan penyaluran kredit bisa semakin membaik," ujarnya.

Menurut Miyono, masih rendahnya penyaluran kredit tersebut memang menjadi perhatian tersendiri bagi BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu,

BI bersama OJK DIY perlu mendorong pertumbuhan pembiayaan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang berada di kisaran 3,5 persen pada 2020 lalu. Meskipun masih rendah, tetapi ada kecenderungan penyaluran kredit meningkat di tahun ini.

"Kegiatan masyarakat dibatasi sehingga konsumsi konsumen sangat berpengaruh. Sebab jika konsumsi tertekan otomatis pertumbuhan ekonomi menurun di DIY. Melihat kondisi ini, produsen mengurangi barang kalau yang membeli tidak ada sehingga mereka tidak membutuhkan tambahan modal dan para pengusaha masih memandang tingkat risikonya sehingga mereka cenderung masih menahan," tandasnya. **(Ira)-f**

Studi Bioekonomi Jadi Dasar Pengelolaan Perikanan



KR-Rini Suryati

Arifin Rudiyanto (kanan) usai seminar.

JAKARTA (KR) - Pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk perikanan, didasarkan pada kebijakan ilmiah (science-based) dan implementasi berbasis masyarakat (community-based). Oleh karena itu akademisi dan masyarakat lokal, terutama masyarakat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), akan sama-sama dilibatkan dalam membentuk kebijakan publik. "Kebijakan berbasis sains

dan masyarakat ini dinilai akan mendorong peningkatan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, hingga meningkatnya perekonomian nasional," ungkap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar bertajuk 'Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi', di

Jakarta, kemarin.

Sedangkan dari sisi sains, ilmuwan dan akademisi akan dilibatkan untuk merancang skenario kebijakan. Bagi kebijakan berdasarkan sains, data dan informasi yang akurat menjadi kunci. Peneliti bertugas untuk mencari data akurat mengenai sumber daya perikanan di suatu WPP. "Data ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk menentukan berapa banyak kapal yang boleh beroperasi di WPP," kata Arifin.

Sementara dari sisi masyarakat, aspek-aspek kelokalan dan sosial akan menjadi bahan pertimbangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik sosio-ekonomi di setiap WPP. "Kebijakan publiknya nanti tidak bisa sama bagi semua wilayah. Kebijakan yang melibatkan sains dan masyarakat lokal ini diharapkan bisa mendorong inovasi pembangun di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," kata Arifin. **(Ati)-f**

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil. Selain itu terus berupaya mendorong upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dengan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak serta lembaga terkait.

Rapat Dewan Komisiner (RDK) OJK, pekan ini menilai, stabilitas sistem keuangan masih terjaga dan mampu mendorong proses pemulihan perekonomian yang sedang dilakukan Pemerintah berdasarkan data hingga Februari 2021.

"OJK terus memperkuat infrastruktur pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan pengawasan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan. Serta dukungan OJK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam rilisnya, Jumat (26/3).

Wimboh mengatakan, OJK sudah mengeluarkan 7 Peraturan OJK (POJK) dan 10 Surat Edaran OJK (SEOJK) kepada industri jasa keuangan mengenai berbagai ketentuan di industri pasar modal, perbankan dan IKNB sejak awal tahun hingga Maret 2021. Mengenai perkembangan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang dikeluarkan OJK untuk menjaga sektor usaha dan stabilitas sistem keuangan, mengatakan jumlahnya terus meningkat meski trennya semakin melandai sejak akhir tahun lalu.

"Nilai outstanding dikurangi nilai pelunasan restrukturisasi kredit untuk sektor perbankan mencapai Rp825,8 triliun untuk 6,06 juta debitur sampai dengan Januari 2021. Jumlah ini mencapai 15,32 persen dari total kredit perbankan," tuturnya. **(Ira/Lmg)-f**